

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam memastikan kelangsungan hidup suatu negara, dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Hal ini menunjukkan bahwa negara menganggap bahwa pendidikan sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, dan juga mengembangkan potensi diri peserta didik yang notabene sebagian besar merupakan generasi muda.

Generasi muda memiliki posisi dan peran yang sangat vital dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran pemuda menjadi salah satu kunci terlahirnya negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan di atas kemajemukan bangsa Indonesia.

Bagi Indonesia yang menganut sistem politik berlandaskan Pancasila, pendidikan politik Pancasila bagi generasi muda sangat diperlukan untuk lebih

memantapkan sistem politik tersebut. Dengan pendidikan politik yang baik dan mantap diharapkan generasi muda semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mampu memahami dan menanamkan budaya politik yang didambakan yaitu budaya politik partisipan. Untuk itu pembinaan generasi muda dibidang politik merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses pembangunan nasional, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab kita bersama.

Di Indonesia materi dan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan politik dan demokrasi bagi generasi muda diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, yang menyebutkan bahwa substansi yang diberikan dalam pendidikan ini antara lain:

- a) Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara.
- b) Kehidupan dan kerukunan beragama.
- c) Motivasi berprestasi.
- d) Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia.
- e) Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik.
- f) Disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
- g) Kepercayaan pada pemerintah.
- h) Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesadaran politik dan berdemokrasi bagi generasi muda. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sekolah setiap individu akan memiliki kesadaran

berdemokrasi yang cenderung lebih tinggi dan memiliki informasi yang lebih terkait dengan peran penting generasi muda dalam kehidupan politik dan demokrasi. Penanaman nilai-nilai dan karakter yang baik menggunakan metode pembelajaran yang telah ditetapkan dari kurikulum membuat lembaga sekolah menjadi lembaga terstruktur dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada setiap individu.

Menurut Soedijarto (Madiung,dkk,2018:19) pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik memiliki tujuan untuk bisa membantu peserta didik untuk bisa menjadi warga negara yang secara politik dewasa serta ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memiliki misi untuk memberikan pemahaman politik

Pembentukan karakter warga negara yang kritis, kreatif, partisipatif, demokratis, bertanggung jawab inilah yang diharapkan dapat mendorong efektivitas sistem politik demokrasi di Indonesia sesuai dengan misi PPKn sebagaipendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik ini sangat berperan dalam upaya untuk membina warga negara yang berbudaya politik yang matang. Keberhasilan dari implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn tidak akan terlepas dari peran guru PPKn. Guru PPKn merupakan aktor sosialisasi politik di sekolah yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang rasional, cerdas, dan santun kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru PPKn dituntut untuk memahami dan menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKn serta mampu menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang

demokratis, partisipasif, dan menyenangkan bagi peserta didik.

Hal ini sangat urgen, seperti yang dilansir dari detik.com (www.news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019) pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh bahwa "Dalam DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa". Hal ini menunjukkan begitu besarnya potensi dari pemilih pemula yang jumlahnya pastinya akan bertambah lebih banyak di tahun ini dikarenakan momentum Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang dilaksanakan serentak di 270 daerah di Indonesia dan Sumatera Utara melaksanakan 23 pilkada di kabupaten/kota.

Kota Pematangsiantar ikut serta dalam pelaksanaan pesta rakyat yang akan diadakan pada tahun ini dengan persentase pemilih milenial mencapai 40 % yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Pematangsiantar, segmen ini juga mencakup para pemilih pemula yang didominasi oleh siswa-siswi yang berada di tingkat menengah atas.

Hal ini menjadi perhatian penting dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 2019 yang lalu terdapat banyak pelanggaran. Bawaslu yang dilansir dari tagar.id (www.tagar.id/milenial-siantar-diminta-ikut-sukseskan-pilkada-2020) menyatakan terdapat 380 laporan putusan pengadilan terkait pelanggaran, 42 kasus di antaranya adalah politik uang, 12 kasus ujaran kebencian. Dari persentase pelanggaran yang paling sering ditemukan seperti kekerasan dan intimidasi, politik uang, kampanye hitam, dan kehilangan hak memilih.

Dengan potensi politik yang sangat besar namun masih mengalami kondisi begini, dibutuhkan peranan penting dari sekolah untuk melaksanakan pembentukan karakter di sekolah, yaitu dengan cara memainkan peranan penting dalam membentuk sensitifitas siswa terhadap dinamika kepribadian dan mengarahkan pada pandangan mereka terhadap pembangunan praktik politik dan demokrasi saat ini. Salah satu upaya untuk membina generasi muda di bidang politik, yaitu dengan mempersiapkan sejak awal, terutama sejak duduk di bangku sekolah. Melalui pendidikan politik di sekolah, peserta didik akan memperoleh banyak pengetahuan tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan sikap dan perilaku demokratis warga negara.

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Teladan Pematangsiantar yang terletak di Jl. Singosari No. 3, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti ruangan kelas yang memadai, fasilitas penunjang pembelajaran seperti proyektor, jumlah guru yang memadai, serta memiliki peserta didik yang banyak akan menjadi pemilih pemula.

Tabel 1
Guru PPKn SMA Teladan Pematangsiantar

No.	Nama Guru PPKn	NIP	Jabatan
1.	Desriani Siagian, S.Pd	196612011992032007	Guru Mapel
2.	Bambang Natakusuma, S.Pd	197112251998011002	Guru Mapel
3.	Johan Novrianto Saragih, S.Pd	-	Guru Mapel

Sumber : Data Guru SMA Teladan Pematangsiantar

SMA Teladan Pematangsiantar memiliki jumlah rombongan belajar sebanyak 19 rombel dengan jumlah keseluruhan peserta didik sebanyak 745 orang. Kelas X terdapat 5 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 195 orang, kelas XI terdapat 6 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 253 orang, kelas XII terdapat 8 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 297 orang.

Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdapat muatan-muatan pendidikan politik yang tertuang di dalam setiap materinya terutama di dalam pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Selain dalam pembelajaran yang memang benar-benar memuat pendidikan politik sudah sepatutnya guru-guru PPKn untuk memberi pembelajaran pendidikan politik, mengingat peserta didik merupakan para pemilih pemula.

Dengan potensi yang sangat besar tersebut dan begitu pentingnya pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn pada siswa-siswi yang notabene adalah pemilih pemula menjadikan alasan dibutuhkannya penelitian terkait implementasi pendidikan politik dari guru PPKn untuk menanamkan budaya demokratis kepada siswa-siswi di sekolah sebagai sarana pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan tujuan dari pelajaran PPKn.

1.2 Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang telah disebutkan pada identifikasi masalah dengan maksud agar penelitian lebih

terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti, yaitu: Implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn guna menanamkan budaya demokratis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn guna menanamkan budaya demokratis di SMA Teladan Pematangsiantar T.A. 2019/2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn guna menanamkan budaya demokratis di SMA Teladan Pematangsiantar T.A. 2019/2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan pengetahuan tentang implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan guna menanamkan budaya demokratis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan agar Dinas Pendidikan lebih giat untuk memberikan pelatihan kepada guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran.
- b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan guna lebih meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn di sekolah dan mencari solusi terhadap permasalahan dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn guna pengembangan budayademokratis.
- c. Bagi jurusan PPKn FIS UNIMED, sebagai referensi dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan kedepannya tentang mplementasi pendidikan politik.

